

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan hidup merupakan salah satu elemen terpenting dalam paradigma pembangunan yang berkelanjutan, telah mengemuka sebagai salah satu isu pokok yang menjadi perhatian seluruh dunia dalam tahun-tahun terakhir ini. Pemahaman masyarakat internasional tentang bahaya pemanasan global (*global warming*) dirasakan terus meningkat, dimana hal tersebut telah mengancam kehidupan manusia di bumi dengan mendorong negara-negara untuk berperan aktif dalam mengantisipasi ancaman tersebut. Ditambah persoalan energi yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan pemanasan global yang tidak dapat ditangani oleh satu negara.

Energi merupakan salah satu tulang punggung utama jalannya peradaban dengan dukungan ketersediaan energi. Akan tetapi peningkatan kebutuhan energi, serta ketidakstabilan harga dan pasokan energi konvensional, telah memunculkan isu lain berupa krisis energi dan keamanan energi (*energy security*). (Jurnal IPCC 2007, dikutip oleh Fanny Gunawan 2011, hlm. 1). Salah satu gejala krisis energi yang terjadi akhir-akhir ini yaitu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), seperti minyak tanah, bensin dan solar. Kelangkaan terjadi karena tingkat kebutuhan BBM sangat tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya. Sementara ini, minyak bumi dan bahan baku pembuatan BBM berjumlah terbatas dan membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk proses pembentukannya. (Tobing, Astria R. 2014, hlm. 2).

Dalam mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin meluas, maka kerjasama internasional atas kebijakan yang terkait dengan energi, transportasi, dan industri mutlak diperlukan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan pengurangan penggunaan energi yang berbahaya dan tidak ramah lingkungan, menetapkan pajak penggunaan energi yang besar terhadap energi yang tidak ramah lingkungan, sebaliknya menetapkan penghapusan atau pengurangan pajak terhadap penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan yang merupakan sumber energi baru dan terbarukan. Komitmen untuk menetapkan kebijakan ini perlu

dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia agar tercipta pembangunan yang berimbang dengan melemahnya dampak perubahan iklim.

Internasionalisasi isu lingkungan hidup ditandai adanya *Intergovernmental Negotiating Committee* (INC) yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengadakan beberapa konferensi, antara lain konferensi di Kyoto pada bulan Desember 1997, yang menghasilkan kesepakatan Protokol Kyoto, dimana Protokol Kyoto menetapkan target reduksi gas rumah kaca sebesar 5,12 persen hingga tahun 2012. (Syamsul Hadi 2008, dikutip oleh Fanny Gunawan 2011, hlm. 2).

Komitmen mengurangi efek gas rumah kaca juga telah diikuti oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa telah menyadari bahwa satu-satunya cara menghadapi permasalahan bidang energi adalah dengan menghadapinya secara bersama-sama. Tantangan yang dihadapi di bidang energi adalah ancaman *global warming*, dan permasalahan lingkungan lainnya yang menyangkut sekuritas energi, efisiesnsi energi, cara dan tindakan untuk mengurangi emisi gas, dan ketergantungan terhadap energi fosil.

Namun, ada persoalan mendasar yang muncul dalam negosiasi-negosiasi internasional menyangkut pemanasan global, dimana negara maju dan negara berkembang memiliki posisi yang berbeda. Beberapa negara maju terlihat enggan untuk memberikan komitmen pengurangan emisi, termasuk dalam pelaksanaan yang telah disepakati. Sementara negara berkembang yang sedang melaksanakan industrialisasi relatif terlambat dikarenakan komitmennya untuk menurunkan emisi. Hal tersebut jelas tidak adil bagi negara berkembang. Argumentasinya, negara maju telah melalui proses industrialisasi yang memungkinkan negara maju untuk menerapkan arah pembangunan ramah lingkungan. Oleh karena itu, beberapa negara berkembang menuntut diberlakukannya kewajiban bagi negara maju untuk membantu negara berkembang dalam hal alih teknologi, dukungan finansial dan penguatan kapasitas. (McKibben 2008, dikutip oleh Fanny Gunawan 2011, hlm. 3)

Fenomena tersebut telah melahirkan beragam respon interaksi antar negara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memerangi pemanasan global, serta krisis energi yang tengah melanda dunia. Seperti upaya

Finlandia dengan memprakarsai kemitraan *Energy dan Environment Partnership (EEP)* di negara-negara berkembang, seperti Kawasan Mekong yang mulai masuk tahap 2 (dua) yang dimulai tahun 2014-2018, Amerika Selatan, Amerika Tengah dan Afrika Selatan dan Afrika Timur.

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang ditunjuk pada program kemitraan yang diprakarsai oleh Finlandia. Kemitraan ini merupakan program tindak lanjut dari Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007 Bali yang dilaksanakan di bawah payung *Joint Declaration* tentang kerjasama di bidang Climate Change and Sustainable Forest Management. Kemudian, kesepakatan kerjasama dilanjutkan dengan penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* yang merupakan komitmen kedua negara untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang energi dan lingkungan melalui kerjasama *Energy and Environment Partnership (EEP)*.

Program EEP yang ditandatangani pada 14 Februari 2011, merupakan program kerjasama yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim dengan menyediakan energi modern ramah lingkungan, mudah diakses, dan dapat diandalkan di daerah pedesaan serta dalam penggunaannya di sektor industri. Pada program tersebut, pemerintah Finlandia memberikan dana sebesar 4 juta euro dalam bentuk hibah untuk program kerjasama pada periode 2011-2014, terutama bagi pengembangan energi terbarukan biomassa di Indonesia dengan daerah geografis implementasi program EEP akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau.

Pada tahap pertama, program ini akan berfokus pada pemanfaatan biomassa berbasis kayu dan limbah pertanian sebagai sumber energi terbarukan. Program ini telah dimulai pada April 2011. Implementasi proyek-proyek yang didanai oleh EEP Indonesia diawali dengan penandatanganan kontrak pembiayaan antara pelaksana proyek dan Kementerian Luar Negeri Finlandia.



Sumber: *Bioenergy for a bright Future, EEP Indonesia National Coordination Unit*

Gambar 1 Daerah Geografis Impelementasi Program EEP

Berdasarkan gambar 1 diatas, terlihat daerah geografis implementasi program EEP di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau. Pada Provinsi Riau ada 3 kabupaten yaitu Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur dan Pulang Pisang. Sedangkan di Provinsi Riau ada 6 kabupaten seperti Rokan Hulu, Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.

Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki sumber daya energi yang cukup besar. Sumber daya energi tersebut tidak hanya mencakup semua jenis energi fosil yang tidak terbarukan (*unrenewable energy*) seperti gas, minyak bumi dan batubara, tetapi juga energi terbarukan (*renewable energy*) yaitu energi matahari, angin, air, bioenergi dan lain-lain. Berdasarkan data *National Energy Council*, potensi energi baru terbarukan Indonesia pada tahun 2014 secara umum terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Potensi Energi Baru Terbarukan 2011

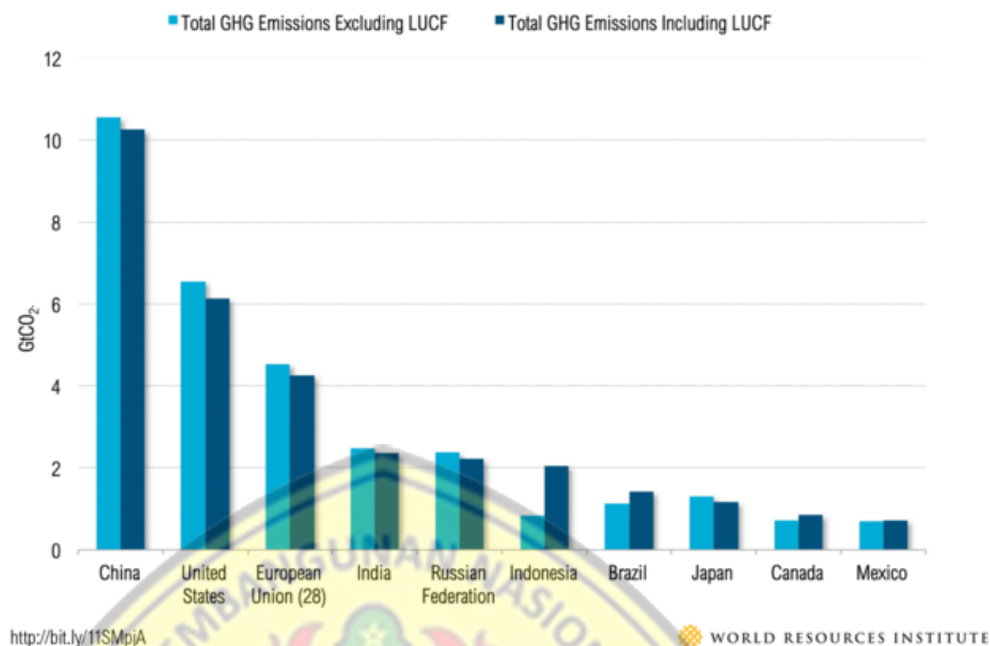
NO	NRE	RESOURCES	INSTALLED CAPACITY (IC)	RATIO IC/RESOURCES (%)
1.	Hydro	75,000 MW	7,572 MW	10,1%
2.	Geothermal	28,910 MW	1,403.5 MW	4.9%
3.	Biomass	32,654 MW	1,717.9 MW	5.4%
4.	Solar	4.80 kWh/m ² /day	48.05 MW-	
5.	Wind	3-6 m/s	1,87 MW	-
6.	Ocean	49 GW	0,01 MW	-
7.	Uranium	3,000 MW	30 MW	-

Sumber: National Energy Council

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa potensi Energi Baru Terbarukan cukup besar, namun pemanfaatan/konsumsinya masih terbilang rendah. Sampai tahun 2011, kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 10.744,16 megawatt (MW) atau 21 persen dari kapasitas terpasang kumulatif pembangkit listrik nasional sebesar 51.981 MW. Terbukti dari data di atas di mana Tenaga Air memiliki potensi sebesar 75,000 MW yang hanya dimanfaatkan sebesar 7,572 MW. Untuk Panas Bumi memiliki potensi sebesar 28,910 MW dan hanya dimanfaatkan sebesar 1,403.5 MW. Dari data diatas, energi baru terbarukan dapat memenuhi kebutuhan energi nasional dalam jangka panjang, yaitu batu bara. Cadangan batubara memiliki jumlah sebesar 104,8 MT yang akan diprediksi dapat bertahan selama 83 tahun mendatang. Sedangkan potensi minyak bumi sudah tidak begitu besar, hanya sebesar 56.6 MB dan diperkirakan akan habis 23 tahun ke depan.

Penggunaan energi baru terbarukan juga menjadi sangat urgen, mengingat ledakan penggunaan energi fosil telah mengarahkan pada situasi yang menurunkan daya dukung lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Di tahun 2011 yaitu pada awal tahun berjalannya program EEP, Indonesia masih masuk dalam 10 emitor terbesar.

Grafik. 1 Sepuluh (10) Negara Emitor GRK akibat Fossil, 2011



Sumber: World Resources Institute

Dari grafik diatas, bisa dilihat bahwa Indonesia pada tahun 2011 masih menjadi salah satu negara penyumbang emisi terbesar setelah China, Amerika Serikat, Uni Eropa, India dan Rusia.

Oleh karena itu, banyak negara menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang selaras dengan tantangan energi, lingkungan, dan pembangunan, perlindungan terhadap lingkungan juga harus diperkuat dengan menerapkan standar emisi yang ketat dengan ditunjang penggunaan energi baru terbarukan. (Dewi Ariyani 2012, hlm. 20-22)

Data-data diatas memperlihatkan betapa Indonesia memiliki banyak cadangan sumber energi yang dapat dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyatnya. Energi bagi Indonesia mempunyai tiga peran utama. Pertama, sumber daya energi sebagai komoditi ekspor yang menyumbangkan porsi yang besar kepada APBN. Kedua, pembangunan dan penopang pertumbuhan ekonomi nasional, dan ketiga sumber daya energi sebagai *feedstock* industri pupuk, kosmetik dan plastik. Meskipun demikian, berbagai macam sumber energi tersebut belum secara optimal atau belum sama sekali dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat Indonesia.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, isu energi dan lingkungan menjadi perhatian masyarakat internasional yang kemudian untuk mengatasi persoalan tersebut diadakan kerjasama bilateral antara negara maju dan berkembang. Salah satunya Finlandia dan Indonesia melalui Energy and Environment Partnership (EEP) yang diprakarsai oleh Finlandia. Indonesia merupakan produsen energi baru terbarukan yang cukup besar, namun pemanfaatannya masih kurang. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan dari **Bagaimana Implementasi Energy and Environment Partnership (EEP) Finlandia – Indonesia 2011-2014?**

I.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Untuk menjelaskan pentingnya peran energi baru terbarukan sebagai energi alternatif fosil yang lebih ramah lingkungan.
- b. Untuk menganalisis bagaimana implementasi dari program Energy and Environment Partnership (EEP) di Indonesia yang diprakarsai oleh Finlandia.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- a. Manfaat Akademis, dapat memberikan informasi dan data-data pendukung yang lebih jelas di dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional untuk memahami perihal kemitraan energi dan lingkungan yang diprakarsai oleh Finlandia.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru yang lebih mendalam mengenai kajian ilmu tentang bagaimana implementasi program Energy and Environment Partnership (EEP) Finlandia – Indonesia.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam rangka menunjang penelitian mengenai “Energy and Environment Partnership (EEP) Finlandia – Indonesia 2011-2014”, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga penulis dapat mengetahui letak signifikansinya terhadap penelitian yang penulis lakukan.

Dalam penelitian yang berjudul **Kepentingan Finlandia dalam Energy and Environment Partnership (EEP) Indonesia oleh Fanny Gunawan** (Fanny Gunawan 2011: hlm. 1-7), membahas kepentingan Finlandia dalam Energy and Environment Partnership (EEP) Indonesia, di mana menurut penulis skripsi ini kerjasama isu lingkungan dan energi yang timbul pada dekade terakhir ini, tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor internal maupun eksternal, baik langsung maupun tidak langsung, di mana energi memainkan peran yang vital dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Indonesia sebagai bangsa besar tentu perlu mewaspadaikan perkembangan yang terjadi dari isu global tersebut, sebab dari potensi-potensi yang ada, Indonesia memiliki peran yang cukup penting di dunia.

Finlandia yang sebagaimana diketahui merupakan negara skandinavia yang cukup stabil dan mengalami kemajuan ekonomi tinggi, termasuk ke dalam negara nordik karena terletak di Eropa Utara dengan ibukota Helsinki.

Penulis skripsi ini menarik kesimpulan dari penelitiannya bahwa kerjasama antar negara adalah satu-satunya cara untuk memecahkan masalah kolektif dari pemanasan global. Sebaliknya, penguatan jaringan saling ketergantungan, menghubungkan perusahaan, individu, aktor *non state*, lembaga dan negara dan diatur oleh norma-norma dan keyakinan bahwa para pelaku membuat, menyebarkan dan menghasilkan bentuk-bentuk kerjasama yang tidak bisa lagi dibatasi untuk menjadi ketat dalam lingkup hubungan antar negara. Dalam kasus kepentingan Finlandia dalam Energy and Environment Partnership di Indonesia, penulis skripsi ini membuat argumen bahwa unsur-unsur struktural keterkaitan fenomena dan sistem internasional yang menjadikannya kerjasama ini sebagai “*virtual reality*” di Indonesia.

Dalam skripsi ini juga menjelaskan secara garis besar apa itu Energy and Environment Partnership, yang merupakan sebuah kerjasama bilateral dengan

partisipasi negara-negara berkembang dalam program yang diprakarsai Finlandia guna mempromosikan energi terbarukan, efisiensi energi dan investasi teknologi bersih pada negara terpilih dalam usaha mitigasi pemanasan global. Merupakan tujuan utama dari kebijakan pembangunan Finlandia, yang dikoordinasi oleh Kementerian Luar Negeri Finlandia (MFA) dalam memberikan kontribusi pada pemberantasan kemiskinan di dunia dengan mengaplikasikan Sasaran Pembangunan Milenium PBB dan prinsip-prinsipnya sebagai prioritas bantuan pembangunan untuk memperluas bidang *know-how* dan pengalaman bagi kepentingan negara-negara berkembang.

Penulis skripsi ini juga menuliskan kebijakan pembangunan dan iklim digunakan untuk memfasilitas apa yang bisa dipahami sebagai kapitalisme hijau global di mana sektor industri Finlandia memiliki upaya keberlanjutan untuk melobi secara bersamaan menurut target pengurangan emisi lebih longgar, tindakan sukarela dan fleksibilitas mekanisme yang memudahkan mengeksport teknologi terbarukan ke negara-negara berkembang.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Kepentingan Finlandia dalam Energy and Environment Partnership (EEP) di Indonesia adalah penulis akan melakukan penelitian terkait dengan implementasi program yang diprakarsai oleh Finlandia tersebut. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini juga berbeda, di mana penulis memperoleh data bahwa Indonesia merupakan produsen biomassa yang besar namun pemanfaatannya masih terbilang rendah. Oleh karena itu, penulis akan meneliti bagaimana implementasi Energy and Environment Partnership (EEP) di Indonesia tahun 2011-2014, yang secara periode sudah selesai diimplementasikan.

Kemudian pada Karya Ilmiah yang ditulis oleh Astri R. Tobing dengan judul **Kerjasama Finlandia – Indonesia Mengenai Energi Terbarukan (Biomassa) 2011-2014**, membahas secara garis besar bentuk kerjasama Finlandia – Indonesia bidang energi terbarukan (biomassa) tahun 2011-2014 atau kepentingan Finlandia dalam kerjasama tersebut. Jurnal ini juga membahas definisi kerjasama internasional, di mana menurut K.J Holsti salah satunya, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan

sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Jurnal ini juga membahas alasan negara-negara mau melakukan kerjasama internasional salah satunya demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.

Dalam jurnal ini, disebutkan bahwa adapun kepentingan Finlandia di mana Finlandia mempromosikan energi baru terbarukan, efisiensi energi, dan investasi teknologi bersih di Indonesia. Selain itu, Jurnal ini juga memaparkan 20 proyek yang didanai oleh Finlandia sebesar 4 juta euro. Selain itu, Jurnal ini juga berisi hambatan-hambatan program Energy and Environment Partnership (EEP) Indonesia, serta kelemahan Indonesia dalam peningkatan hubungan ekonomi dengan negara lain seperti Infrastruktur yang tidak memadai, institusi yang korup dll. Sedangkan kelemahan dari pihak Finlandia yang merupakan bagian dari Uni Eropa itu sendiri seperti, adanya ketidakseimbangan fiskal, hambatan dalam pergerakan sumber daya dan lain-lain.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan hasil dari penelitian jurnal ini adalah, penulis akan meneliti implementasi dari kerjasama Energy and Environment Partnership (EEP) di Indonesia, sehingga penulis nantinya akan menemukan jawaban dari permasalahan pemanfaatan biomassa di Indonesia. Sedangkan dalam jurnal ini jelas terlihat bahwa jurnal ini lebih membahas kepentingan Finlandia dalam program kerjasama tersebut, dan penelitian pada jurnal ini juga lebih banyak melihat dari sisi Finlandia.

Selanjutnya, **Laporan Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2009, Framework Document, “The Energy and Environment Partnership with Central America (EEP-CA)”**, menjelaskan bahwa Energy and Environment Partnership merupakan sebuah program kerjasama yang di prakarsai oleh Finlandia dalam mempromosikan energi terbarukan, efisiensi energi dan investasi teknologi bersih pada negara terpilih. Bertujuan memberikan layanan energi keberlanjutan kepada masyarakat miskin dan secara simultan memerangi perubahan iklim. EEP mendukung (pra-) studi kelayakan, survei sumber daya, kegiatan demonstrasi dan ujicoba, pengembangan kebijakan, pengembangan

kapasitas dan penyebaran dan pertukaran informasi. Program ini dirancang untuk memfasilitasi pengembangan inovatif, pendekatan ide dan konsep, ke proyek-proyek investasi keberlanjutan dan membawa manfaat besar bagi negara-negara mitranya.

Jurnal ini merupakan hasil kerjasama yang telah terjadi antara Finlandia dengan 7 negara Amerika Tengah (Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama dan Republik Dominika) yang diluncurkan oleh Kementerian Luar Negeri Finlandia pada tahun 2002 dilanjutkan pada tahun 2003, di mana Finlandia telah mengalokasikan dana hibah total 7 juta Euro untuk kemitraan ini.

Di tahun 2007, Austria ikut bergabung memberikan kontribusi yang signifikan, dengan penambahan 1,8 juta Euro guna pembiayaan publik kemitraan tersebut. Dalam kerangka kolaboratif, pendanaan parsial sejauh ini telah diberikan kepada sekitar 200 proyek. Termasuk penelitian proyek, studi kelayakan, skema pilot dan demonstrasi dalam efisiensi energi, serta bidang utamanya yakni energi terbarukan serta pemanfaatan tenaga angin, surya, air (*hydro*), energi panas bumi, biomassa dan biofuel. Proyek-proyek tersebut telah dikembangkan oleh berbagai pihak termasuk badan publik, perusahaan swasta, koperasi, penelitian institut, universitas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Berdasarkan hasil yang menggembirakan EEP Amerika Tengah, Kementerian Luar Negeri Finlandia memulai program yang sama di negara-negara lain dengan cakupan mempromosikan kerjasama bilateral dan berusaha untuk mengembangkan solusi lokal untuk kebutuhan lokal, berdasarkan kekuatan partisipasi sektor swasta dan kewirausahaan.

Laporan *The Energy and Environment Partnership with Central Amerika (EEP-CA)* telah membantu penulis akan gambaran proyeksi permodelan kesuksesan Finlandia dalam mengembangkan EEP di negara-negara Amerika Tengah. Kesamaan penulis dengan laporan yang telah diuraikan di atas ialah permasalahan Energy and Environment Partnership yang di prakarsai oleh Finlandia.

I.6 Kerangka Teori

Teori memberikan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Kerangka teori dapat membantu dalam menentukan arah dan tujuan pembahasan, serta untuk menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara menganalisis sebab dan akibat dari gejala-gejala sosial yang diteliti. Oleh karena itu, untuk dapat menjelaskan, mengkaji, dan mengetahui bagaimana implementasi Energy and Environment Partnership (EEP) Finlandia – Indonesia dibutuhkan beberapa teori dan konsep yang relevan untuk menganalisa permasalahan tersebut.

I.6.1 Teori Kerjasama Internasional

Meningkatnya hubungan antar negara pada masa ini, sangat tepat rasanya menggunakan Teori Kerjasama Internasional dalam penelitian ini, karena semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Perkembangan situasi hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional dan berkembangnya berbagai aspek diantaranya rasionalisme ekonomi di berbagai kawasan telah membawa pengaruh semakin besarnya persoalan sosial ekonomi yang lebih menyita perhatian negara-negara di dunia melalui serangkaian kerjasama internasional.

Demikian halnya, negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya.

Dari peraturan substansinya, dapat dibedakan dalam dua kategori berupa *Law making treaties*, yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa, sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum

internasional. Sedangkan perjanjian internasional yang digolongkan sebagai *treaty contracts* mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang mengadakan saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian-perjanjian internasional yang tergolong *treaty contracts* tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional.

Perkembangan yang pesat dalam hubungan luar negeri yang paling penting adalah kerjasama internasional yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian. Setiap perjanjian internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara yang menyatakan teirkat ke dalamnya melalui suatu peraturan perundang-undangan nasional dimaksudkan agar suatu perjanjian internasional dapat dilaksanakan dalam suatu negara. Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sma. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan negara lain.

Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya, persetujuan atau masalah-maslah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka. (Holsti, 1992:hlm. 652-653)

I.6.2 Implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Usman, 2002: hlm. 70).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”(Setiawan, 2004: hlm. 39).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”(Harsono, 2002: hlm. 67).

I.6.3 Energy and Environment Partnership

Energy and Environment Partnership adalah program kerjasama bilateral antara Pemerintah Finlandia dengan Pemerintah negara berkembang untuk mempromosikan energi terbarukan, efisiensi energi dan investasi teknologi energi bersih di negara-negara berkembang. Energy and Environment Partnership merupakan sebuah program kerjasama yang di prakarsai oleh Finlandia dalam mempromosikan energi terbarukan, efisiensi energi dan investasi teknologi bersih pada negara terpilih. Bertujuan memberikan layanan energi keberlanjutan kepada masyarakat miskin dan secara simultan memerangi perubahan iklim. EEP mendukung (pra-) studi kelayakan, survei sumber daya, kegiatan demonstrasi dan ujicoba, pengembangan kebijakan, pengembangan kapasitas dan penyebaran dan pertukaran informasi. Program ini dirancang untuk memfasilitasi pengembangan inovatif, pendekatan ide dan konsep, ke proyek-proyek investasi keberlanjutan dan membawa manfaat besar bagi negara-negara mitranya.

Untuk Energy and Environment Partnership di Indonesia sendiri, program ini dimulai pada April 2011 dan kegiatan telah dilaksanakan di tingkat pusat yaitu di Jakarta dan dua propinsi target yaitu Kalimantan Tengah dan Riau. EEP di Indonesia bertujuan untuk mendukung secara luas penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, dengan fokus pada bioenergi serta memerangi perubahan iklim.

Tujuan EEP Indonesia, program yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Finlandia (Ministry for Foreign Affairs, MFS) dan dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (Direktorat Bioenergi), menyediakan pendanaan untuk proyek energi terbarukan, khususnya proyek-proyek terkait bioenergi, penelitian, pengembangan kapasitas dan pertukaran informasi di Propinsi Kalimantan Tengah dan Riau, Selain itu, EEP Indonesia berkontribusi untuk mengembangkan kebijakan energi terbarukan di kedua propinsi target dan tingkat pusat di Indonesia.

Selain itu, tujuan keseluruhan dari program kerjasama lingkungan dan energi dengan Indonesia ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap energi terbarukan yang berkelanjutan dan mengurangi tingkat pertumbuhan emisi gas

rumah kaca yang dapat mempercepat terjadinya perubahan iklim di provinsi Riau dan Kalimantan Tengah yang ikut serta dalam program ini.

EEP Indonesia akan berusaha mengatasi beberapa isu dan hambatan yang mengganggu keberhasilan pembangunan sosio-ekonomi dengan memfokuskan diri pada penggunaan sumber-sumber energi tradisional secara efisien serta memajukan teknologi energi terbarukan dan contoh bisnis yang inovatif bagi kriteria layanan energi.

Maka dari itu, EEP Indonesia (Kerjasama Lingkungan dan Energi dengan Indonesia) akan:

- a. Mempromosikan penggunaan energi terbarukan khususnya biomassa yang berbasis bioenergi di Indonesia.
- b. Meningkatkan akses terhadap energi di daerah terpencil khususnya dalam menolong kaum wanita dan kelompok yang kurang mampu.
- c. Meningkatkan pelayanan energi bagi mata pencaharian dan kebutuhan transportasi bagi warga kurang mampu.
- d. Berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan mitigasi dampak perubahan iklim global.

Berdasarkan pengalaman disain dan pelaksanaan yang dilakukan oleh EPP Amerika Tengah, EEP Indonesia bertujuan untuk menegakkan tiga pilar utama pembangunan yang berkelanjutan,, yaitu: ekonomi, sosial dan lingkungan. Seluruh lapisan masyarakat baik itu pemerintah, LSM dan perusahaan swasta akan diundang untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan proyek agar tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

EEP Indonesia berkolaborasi dengan program energi terbarukan lainnya yang beroperasi di Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara, khususnya dengan negara-negara di wilayah Mekong yang terlibat pada program *Energy and Environment Partnership with the Mekong Region Countries*. Program itu dikenal dengan EEP Mekong, juga didanai oleh Kementerian Luar Negeri Finlandia. (EEP with Indonesia Buletin, 2011:3)

I.6.4 Kemitraan

Secara teoritis, Eisler dan Montuori (1997) membuat pernyataan yang menarik yang berbunyi bahwa “memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternatif yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama ke arah membangun sebuah organisasi kemitraan.” Dewasa ini, gaya-gaya seperti perintah dan kontrol kurang dipercaya. Di dunia baru ini, yang dibicarakan orang adalah tentang karyawan yang “berdaya”, yang proaktif, karyawan yang berpengetahuan yang menambah nilai dengan menjadi agen perubahan. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI) meliputi:

- a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak merupakan “mitra” atau “partner”.
- b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencari kepentingan bersama.
- c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan peran masing-masing.
- d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan di mana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali, kesepakatan bila diperlukan. (Ditjen P2L & PM, 2004 : hlm. 1).

Prinsip kemitraan terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan, yaitu:

- a. Prinsip Kesetaraan (Equity) Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepati
- b. Prinsip Keterbukaan, keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Kebutuhan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).
- c. Prinsip Azas, manfaat bersama (mutual benefit), individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

Menurut Berul Lvinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan, yaitu:

- a. *Potential Partnership*
Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain, tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat.
- b. *Nascent Partnership*
Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal.
- c. *Complementary Partnership*
Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhtian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program *delivery* dan *resource mobilization*.
- d. *Synergistic Partnership*

Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi Penelitian

- a. Indonesia memiliki potensi Energi Baru Tebarukan (EBT) yang sangat besar namun tidak digunakan secara maksimal.
- b. Potensi EBT di Indonesia membuat Finlandia ingin bekerjasama dalam bentuk teknologi energi yang efisien.
- c. Program yang diprakarsai oleh Finlandia yaitu EEP merupakan langkah lanjutan untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan

I.9 Metode Penelitian

I.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada di dalam interaksi manusia (Catherine Marshall:2002)

I.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. (Suharsimi, 2002). Wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara dengan pedoman. Wawancara dengan penggunaan pedoman (*interview guide*) dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan – persoalan yang akan diteliti. Pedoman wawancara biasanya tak berisi pertanyaan – pertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi apa yang ingin didapatkan dari narasumber yang nanti dapat disumbangkan dengan memperhatikan perkembangan konteks dan situasi wawancara

Teknik pengumpulan data primer merupakan hasil-hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa informan yang dipilih dan memiliki informasi dan juga data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti Kementrian ESDM dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan/dokumen peneliti yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. (Suharsimi, 2002 : hlm. 1)

Teknik pengumpulan data sekunder adalah bahan-bahan tertulis dan juga data-data resmi yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan sendiri dilakukan melalui penelusuran informasi beserta pengumpulan data tertulis yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah dan juga laporan-laporan penelitian sebelumnya serta melalui surat kabar, artikel dan situs internet.

I.9.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk menganalisis permasalahan dan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran fenomena yang terjadi secara relevan dengan permasalahan yang penulis teliti. Teknis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kerangka konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian konsep tersebut dijadikan pedoman dalam penjelasan dan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk menjawab implementasi program Energy and Environment Partnership (EEP) Finlandia – Indonesia.

I.10 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman dan menjelaskan mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi empat (4) bab yang terdiri dari bab dan sub-sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut yaitu Bab I yang berisi pendahuluan, bab ini akan menyajikan latar belakang masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, asumsi dan tinjauan pustaka. Sub-sub bab terakhir dalam bab ini adalah metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan. Selanjutnya Bab II akan membahas mengenai Latar belakang Energy and Environment Partnership (EEP) yang diprakarsai oleh Finlandia.

Pada Bab III berisi analisis dari implementasi program Energy and Environment Partnership (EEP) Finlandia – Indonesia periode 2011 – 2014 secara lebih dalam. Sedangkan pada Bab IV atau bab terakhir terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran, di mana pada bab penutup ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian sebagai bagian akhir dari hasil penelitian dan saran untuk memberikan masukan terkait permasalahan yang penulis teliti